



## Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu Pembelajaran di SMKN 1 Palangka Raya

Alpina Siska<sup>1</sup>, Ade Tiara<sup>2</sup>, Calissta Audrie Salsabila<sup>3</sup>, Marla Carolina<sup>4</sup>, Okshe Hana Gandi<sup>5</sup>, Ratih Sulistyowati<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Program Studi Manajemen Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email:

[alpinasiska04@gmail.com](mailto:alpinasiska04@gmail.com), [Tiaratiara0695@gmail.com](mailto:Tiaratiara0695@gmail.com), [calisstaaudriesalsabila@gmail.com](mailto:calisstaaudriesalsabila@gmail.com), [marlaa.carolina0007@gmail.com](mailto:marlaa.carolina0007@gmail.com), [okshehanagandi@gmail.com](mailto:okshehanagandi@gmail.com), [ratihsw13@gmail.com](mailto:ratihsw13@gmail.com)

\*Email Korespondensi: [alpinasiska04@gmail.com](mailto:alpinasiska04@gmail.com)

Diterima: 27-05-2026 | Disetujui: 04-06-2026 | Diterbitkan: 06-06-2026

### ABSTRACT

*This study aims to describe the management of the education budget at SMKN 1 Palangka Raya and analyze its alignment with the principles of effectiveness, efficiency, transparency, accountability, and participation in the Merdeka Belajar era. The research employs a qualitative method with observation, in-depth interviews with the principal, treasurer, teachers, and school committee, as well as documentation. The findings reveal that the school relies on two primary funding sources: BOS (School Operational Assistance) from the central government and BPP (student contributions) as supplementary funding. Budget planning is conducted through coordination meetings involving the school management team, department heads, and teachers. As a vocational school, the highest priority is allocated to practical learning needs. Financial administration is carried out both manually and digitally, with oversight from the Inspectorate, BPK, and the school committee. The main obstacles include limited BOS funds and a high rate of BPP payment arrears. This study concludes that budget management at SMKN 1 Palangka Raya is fairly well implemented but still requires increased regulatory flexibility and stability in the digital reporting system.*

**Keywords:** Budget Management; Education Financing; Learning Quality; Vocational School; Merdeka Belajar

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan anggaran pendidikan di SMKN 1 Palangka Raya serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam era Merdeka Belajar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam kepada kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah mengandalkan dua sumber dana utama yaitu BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat sebagai sumber utama dan BPP (iuran siswa) sebagai dana tambahan. Perencanaan anggaran dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan tim manajemen sekolah, ketua jurusan, dan guru. Sebagai sekolah kejuruan, prioritas tertinggi dialokasikan untuk kebutuhan pembelajaran praktik siswa. Administrasi keuangan dilakukan secara manual dan digital dengan pengawasan dari Inspektorat, BPK, dan komite sekolah. Kendala utama

adalah keterbatasan dana BOS dan tingginya tunggakan pembayaran BPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di SMKN 1 Palangka Raya sudah cukup baik namun masih perlu peningkatan fleksibilitas regulasi dan stabilitas sistem pelaporan digital.

**Katakunci:** Pengelolaan Anggaran; Pembiayaan Pendidikan; Mutu Pembelajaran; SMK; Merdeka Belajar

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Siska, A. ., Tiara, A. ., Salsabila, C. A., Carolina, M. ., Gandi, O. H. ., & Sulistyowati, R. . (2026). Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu Pembelajaran di SMKN 1 Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 730-738. <https://doi.org/10.63822/6s09wy07>

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sektor fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang relevan dan tenaga pendidik yang kompeten, tetapi juga oleh ketersediaan serta pengelolaan anggaran yang memadai, transparan, dan akuntabel (Mulyasa, 2017; Fattah, 2018). Dalam konteks implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sekolah diberikan otonomi yang lebih besar untuk mengelola pembiayaan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan (Kemendikbudristek, 2022).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah umum lainnya. Sebagai lembaga pendidikan vokasi, SMK dituntut untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja, sehingga membutuhkan biaya operasional yang relatif besar, terutama untuk penyediaan bahan praktik, peralatan, dan pemeliharaan bengkel (Pardjono, 2016; Sudira, 2019). Tanpa didukung pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, mutu pembelajaran di SMK sulit untuk diwujudkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhayati & Suryadi (2021) yang menemukan bahwa sekolah kejuruan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal alokasi anggaran untuk kebutuhan praktik.

Penelitian sebelumnya oleh Hasanah & Wibowo (2022) tentang manajemen pembiayaan di SMK Negeri di Kota Bandung menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) masih sangat tinggi, sementara dana dari partisipasi masyarakat belum optimal. Sementara itu, penelitian Lestari et al. (2023) mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi ARKAS dalam pengelolaan keuangan sekolah masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti perubahan sistem yang sering terjadi dan kurangnya pelatihan bagi bendahara sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus lokasi di SMKN 1 Palangka Raya yang mewakili wilayah Kalimantan Tengah dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang spesifik, serta analisis yang menghubungkan secara langsung pengelolaan anggaran dengan upaya mewujudkan mutu pembelajaran di era Merdeka Belajar.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh tim peneliti, SMKN 1 Palangka Raya merupakan salah satu sekolah kejuruan negeri yang cukup representatif di Kota Palangka Raya. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik sekitar 1.098 siswa dengan 120 tenaga pendidik dan kependidikan, serta fasilitas yang cukup lengkap seperti laboratorium komputer dan bengkel praktik. Namun, seperti kebanyakan sekolah negeri lainnya, sekolah ini juga menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan anggaran yang sering kali tidak mencukupi total kebutuhan operasional. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sumber pembiayaan, perencanaan, pengalokasian, administrasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran di SMKN 1 Palangka Raya? (2) Apakah pengelolaan anggaran di sekolah tersebut telah mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi? (3) Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di SMKN 1 Palangka Raya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif praktik pengelolaan anggaran pendidikan serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan yang baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat fakta-fakta serta sifat-sifat objek

-----  
*Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu Pembelajaran di SMKN 1 Palangka Raya*

(Siska, et al.)

yang diteliti (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian di SMKN 1 Palangka Raya, Jalan Tambun Bungai No.77, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Waktu pelaksanaan pada bulan Mei 2026.

Informan ditentukan secara *purposive sampling* terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap kondisi fisik sekolah dan fasilitas, wawancara semiterstruktur dengan pedoman yang dikembangkan dari delapan aspek panduan observasi, serta dokumentasi profil sekolah dan dokumen keuangan. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (2014) meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik dan Kondisi Umum SMKN 1 Palangka Raya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa SMKN 1 Palangka Raya memiliki profil sebagai sekolah negeri dengan jenjang pendidikan SMK yang berlokasi di kawasan strategis Kota Palangka Raya. Jumlah peserta didik tercatat sekitar 1.098 siswa, sementara jumlah guru dan tenaga kependidikan mencapai 120 orang. Kondisi sarana dan prasarana secara umum dinilai cukup baik. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang kelas, laboratorium komputer, bengkel praktik, ruang UKS, dan ruang guru. Lingkungan sekitar sekolah cukup strategis karena dekat dengan rumah sakit, sekolah lain, pusat kegiatan masyarakat, serta pusat kegiatan keagamaan seperti Hindu Center dan Kaharingan Center.

Kondisi geografis dan sosial kemasyarakatan ini, menurut penjelasan pihak sekolah, turut mempengaruhi pola pengelolaan pembiayaan. Sekolah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan fasilitas yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai kegiatan. Di sisi lain, keberadaan fasilitas umum yang memadai di sekitar sekolah juga memudahkan akses orang tua siswa dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam kegiatan sekolah, termasuk rapat-rapat koordinasi terkait anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzi & Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa karakteristik lingkungan sekitar sekolah berpengaruh signifikan terhadap pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

### Sumber Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf keuangan, diketahui bahwa SMKN 1 Palangka Raya mengandalkan dua sumber dana utama. Sumber pertama dan yang paling dominan adalah BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber kedua adalah BPP (iuran siswa) yang dikumpulkan secara rutin setiap bulan sebagai dana tambahan. Kepala sekolah menjelaskan bahwa kedua sumber dana ini berjalan beriringan dan saling menutupi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu sumber saja. Namun demikian, ketergantungan terbesar tetap berada pada dana BOS. Apabila dana tersebut terlambat cair atau mengalami pemotongan, dampaknya langsung terasa pada operasional sehari-hari sekolah, mulai dari pembayaran listrik, gaji pegawai tidak tetap, hingga berbagai kebutuhan pemeliharaan fasilitas.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati & Kurniawan (2020) yang menemukan bahwa rata-rata sekolah negeri di Indonesia memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana BOS mencapai 70-85% dari total kebutuhan operasional. Kondisi ini menjadi

-----  
*Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu Pembelajaran di SMKN 1 Palangka Raya*

(Siska, et al.)

tantangan tersendiri dalam era Merdeka Belajar yang menuntut kemandirian dan inovasi sekolah. Menurut bendahara sekolah, SMKN 1 Palangka Raya sebenarnya memiliki keinginan untuk mengembangkan sumber dana alternatif, namun sebagai sekolah negeri yang berada di bawah naungan pemerintah, ruang geraknya terbatas karena semua pengelolaan keuangan harus mengikuti aturan dan arahan yang telah ditetapkan, berbeda dengan sekolah swasta yang memiliki fleksibilitas lebih melalui kerja sama dengan yayasan.

### **Perencanaan Anggaran (RKAS/RAPBS)**

Proses perencanaan anggaran di SMKN 1 Palangka Raya dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, proses ini tidak dikerjakan oleh bendahara seorang diri, melainkan melalui mekanisme rapat koordinasi yang matang dan melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang terlibat antara lain kepala sekolah, empat orang wakil kepala sekolah, bendahara, operator, serta 13 orang ketua kompetensi keahlian (ketua jurusan). Sebelum rapat koordinasi tingkat manajemen dilaksanakan, masing-masing ketua jurusan terlebih dahulu mengadakan diskusi internal di lingkungan kompetensi keahlian mereka untuk menghitung kebutuhan biaya selama satu tahun ajaran, yang kemudian dilaporkan kembali ke tingkat manajemen.

Untuk pengelolaan dana BOS, perencanaan dilakukan melalui aplikasi khusus yang disediakan oleh pemerintah, yaitu ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Yang menjadi pegangan utama dalam proses penyusunan RKAS adalah visi misi sekolah dan rencana kerja tahunan, sehingga setiap anggaran yang disusun memiliki arah yang jelas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryani & Hartono (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan ARKAS telah mendorong digitalisasi perencanaan anggaran di sekolah-sekolah di Indonesia, meskipun masih menghadapi berbagai kendala teknis. Kepala sekolah SMKN 1 Palangka Raya mengakui bahwa sistem aplikasi sering berubah-ubah di lapangan, sehingga menyulitkan proses adaptasi bagi tim penyusun anggaran.

### **Pengalokasian dan Penggunaan Dana**

Dalam hal pemanfaatan dana, SMKN 1 Palangka Raya menetapkan skala prioritas yang ketat dengan mendahulukan kebutuhan yang dinilai paling mendesak. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, sebagai lembaga pendidikan vokasi (SMK), pemenuhan bahan praktik dan peralatan praktik bagi siswa menempati urutan paling utama karena menjadi instrumen mendasar dalam proses belajar-mengajar. Selain itu, sebagian anggaran juga dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas, pembayaran listrik, dan kebutuhan internet. Kebutuhan seperti internet, listrik, dan sarana prasarana selalu menjadi prioritas utama setelah kebutuhan praktik karena dianggap paling mendasar bagi kelangsungan proses pembelajaran.

Wawancara dengan staf keuangan mengungkapkan bahwa dalam pengalokasian dana, sekolah berusaha menjaga keseimbangan dengan membagi anggaran ke dalam pos-pos yang sudah ditetapkan sejak awal. Kebutuhan rutin seperti listrik dan internet sudah memiliki alokasi yang relatif tetap setiap tahunnya, sementara anggaran untuk pengembangan mutu bisa berubah menyesuaikan program yang direncanakan. Untuk penggajian, guru honor dibayar menggunakan dana BPP, sedangkan pegawai tidak tetap mendapat gaji dari dana BOS. Biaya untuk kegiatan sekolah, termasuk berbagai acara yang melibatkan siswa kelas 12, juga sudah dianggarkan dari BPP sejak awal tahun ajaran. Dengan pengaturan ini, siswa tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar BPP yang sudah mereka bayarkan secara rutin.

Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah telah berusaha menerapkan prinsip efektivitas (anggaran

tepat sasaran) dan efisiensi (menghemat dengan skala prioritas). Namun demikian, kepala sekolah mengakui bahwa keterbatasan dana sering kali menjadi kendala terbesar, di mana total kebutuhan sekolah sering tidak tercukupi oleh total anggaran yang tersedia. Strategi yang diterapkan adalah mendahulukan aspek yang paling penting, sementara program atau kebutuhan lain yang tidak mendesak dapat ditangguhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen keuangan publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) bahwa dalam kondisi keterbatasan sumber daya, pemerintah dan lembaga publik harus mampu menentukan prioritas secara cermat.

### **Administrasi Keuangan**

Dalam hal pencatatan keuangan, SMKN 1 Palangka Raya menggunakan dua cara sekaligus, yaitu secara manual dan digital. Berdasarkan wawancara dengan staf keuangan, pendekatan ganda ini sengaja diterapkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya selisih atau kesalahan dalam pembukuan. Setiap transaksi didukung oleh bukti fisik seperti kuitansi dan nota pembelian yang disimpan sebagai dokumen resmi. Laporan keuangan kemudian disusun setiap akhir bulan dan disampaikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah sebelum diteruskan ke pemerintah pusat. Pelaporan ke pusat mengikuti tahapan pencairan dana BOS, di mana laporan tahap pertama harus diselesaikan sekitar bulan Juni sebelum dana tahap kedua dapat dicairkan.

Kepala sekolah menambahkan bahwa saat ini pengelolaan dana di sekolah telah beralih menggunakan aplikasi ARKAS yang terhubung langsung dengan Dinas Pendidikan. Kendati pemanfaatan teknologi ini membantu digitalisasi pembukuan, sekolah masih kerap menghadapi tantangan berupa sistem aplikasi yang sering berubah-ubah di lapangan. Penelitian Wulandari & Prasetyo (2025) juga menemukan bahwa meskipun ARKAS meningkatkan efisiensi pelaporan, ketidakstabilan sistem dan perubahan regulasi yang sering menjadi keluhan utama bendahara sekolah di berbagai daerah. Oleh karena itu, staf keuangan SMKN 1 Palangka Raya tetap mempertahankan pencatatan manual sebagai cadangan (backup) untuk mengantisipasi kemungkinan eror pada sistem digital.

### **Pengawasan dan Pertanggungjawaban**

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan keuangan sekolah melibatkan beberapa pihak sekaligus. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah, sementara pengawasan eksternal melibatkan Inspektorat, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan pengawas sekolah. Pengawasan tidak dilakukan setiap bulan, tetapi berlangsung secara berkala, terutama setelah proses rekonsiliasi selesai dilakukan. Komite sekolah turut mengambil peran aktif dalam memantau jalannya pengelolaan keuangan agar dana yang ada benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Sebagai wujud transparansi, sekolah secara rutin mengadakan rapat yang menghadirkan kepala program, kepala jurusan, dan komite, sehingga semua pihak dapat mengetahui secara langsung berapa anggaran yang dialokasikan dan bagaimana penggunaannya. Informasi keuangan ini tidak hanya disampaikan kepada para ketua jurusan untuk kemudian diteruskan kepada para guru di lingkungan konsentrasi keahlian masing-masing, tetapi juga disosialisasikan secara langsung kepada orang tua siswa yang sengaja diundang oleh pihak sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, misalnya dengan memasang papan pengumuman realisasi anggaran di area publik sekolah.

### **Analisis Prinsip Pengelolaan Anggaran**

Berdasarkan data yang terkumpul, pengelolaan anggaran di SMKN 1 Palangka Raya dapat dianalisis menggunakan lima prinsip utama manajemen pembiayaan pendidikan. Pertama, efektivitas tercermin dari penggunaan anggaran yang sesuai dengan peruntukan dan mendukung kegiatan utama pembelajaran praktik. Prioritas pada bahan dan peralatan praktik menunjukkan bahwa sekolah memahami fungsi utamanya sebagai lembaga vokasi. Kedua, efisiensi diwujudkan melalui penerapan skala prioritas yang ketat dan kebijakan memangkas pos pengeluaran yang tidak mendesak ketika dana terbatas. Ketiga, transparansi terlihat dari pemaparan laporan anggaran dalam rapat rutin, sosialisasi kepada orang tua siswa, serta keterbukaan informasi kepada guru dan komite. Keempat, akuntabilitas ditunjukkan dengan penyusunan laporan keuangan secara rutin setiap bulan, pelaporan ke kepala sekolah, dan kesediaan untuk diaudit oleh Inspektorat serta BPK. Kelima, partisipasi diimplementasikan melalui pelibatan tim manajemen, ketua jurusan, guru, dan komite dalam proses perencanaan anggaran.

Namun demikian, kepala sekolah juga mengakui bahwa partisipasi orang tua siswa masih menjadi tantangan, terutama dalam hal kepatuhan membayar iuran BPP. Banyak siswa yang menunggak pembayaran hingga kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi belum sepenuhnya berjalan optimal dari sisi orang tua. Penelitian Anggraini & Susanto (2023) di sekolah menengah kejuruan di Jawa Timur juga menemukan pola serupa, di mana tingkat ekonomi orang tua yang beragam menjadi faktor utama rendahnya disiplin pembayaran iuran sekolah.

### **Permasalahan, Kendala, dan Solusi**

Seperti halnya sekolah lain, kendala keuangan juga pernah dirasakan di SMKN 1 Palangka Raya. Berdasarkan wawancara dengan staf keuangan, kendala utama terjadi pada saat BPP tidak boleh ditarik sehingga sekolah menghadapi ketimpangan anggaran yang cukup menyulitkan. Selain itu, keterbatasan dana BOS yang sering kali tidak mencukupi total pengeluaran sekolah menjadi tantangan permanen. Faktor penyebab lainnya adalah rendahnya kesadaran membayar BPP dari orang tua siswa, di mana masih banyak siswa yang menunggak hingga lulus.

Langkah yang diambil sekolah ketika menghadapi kendala adalah memangkas beberapa pos pengeluaran yang dinilai belum terlalu mendesak, lalu mengalihkannya ke kebutuhan yang lebih prioritas. Kepala sekolah menjelaskan bahwa strategi penerapan skala prioritas ini menjadi solusi andalan. Meskipun demikian, karena skala sekolah yang tidak terlalu besar (sekitar 1.098 siswa), kendala semacam itu masih bisa dikelola dengan baik. Terkait inovasi, sekolah telah menerapkan penggunaan aplikasi ARKAS untuk digitalisasi pembukuan. Namun, kepala sekolah menyampaikan harapannya agar ke depan sistem pelaporan lebih stabil dan mudah dioperasikan, serta regulasi pengalokasian dana dapat lebih fleksibel tanpa dibatasi oleh aturan persentase yang kaku.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Firman & Nurdin (2024) yang menyatakan bahwa sekolah negeri di Indonesia masih sangat tergantung pada regulasi pusat sehingga ruang inovasi dalam mencari sumber dana alternatif sangat terbatas. Hal yang paling perlu diperbaiki dari manajemen pembiayaan menurut pihak sekolah adalah fleksibilitas regulasi dan stabilitas sistem digital.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran

-----  
*Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu Pembelajaran di SMKN 1 Palangka Raya*

(Siska, et al.)

pendidikan di SMKN 1 Palangka Raya telah dilaksanakan dengan cukup baik dan mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, meskipun belum optimal pada aspek partisipasi orang tua dalam pembayaran iuran. Sumber pembiayaan utama berasal dari dana BOS dan didukung oleh BPP. Prioritas anggaran yang tepat pada kebutuhan praktik siswa telah mendukung mutu pembelajaran vokasi. Sekolah menggunakan sistem administrasi ganda (manual dan digital) serta melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana BOS yang tidak selalu mencukupi total kebutuhan dan rendahnya disiplin pembayaran BPP. Solusi yang diterapkan adalah penerapan skala prioritas yang ketat dan penundaan program tidak mendesak.

Penelitian ini memberikan rekomendasi: (1) Regulasi persentase alokasi dana perlu lebih fleksibel agar sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan; (2) Sistem aplikasi ARKAS perlu distabilkan dan tidak sering berubah agar bendahara sekolah dapat beradaptasi dengan lebih baik; (3) Sekolah perlu memperkuat sosialisasi dan penegakan aturan pembayaran BPP kepada orang tua siswa, misalnya dengan sistem peringatan bertahap dan pembinaan; (4) Diperlukan eksplorasi inovasi sumber dana alternatif yang tidak melanggar aturan sekolah negeri, seperti kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DU/DI) yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Susanto, T. (2023). Partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan di SMK Negeri se-Kota Malang. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 17(2), 145-158.
- Fattah, N. (2018). *Landasan manajemen pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Fauzi, A., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh lingkungan sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 18(1), 34-45.
- Firman, F., & Nurdin, N. (2024). Tantangan fleksibilitas regulasi dalam pengelolaan dana BOS di era Merdeka Belajar. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 89-102.
- Hasanah, U., & Wibowo, A. (2022). Manajemen pembiayaan di SMK Negeri Kota Bandung: Studi kasus ketergantungan dana BOS. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(1), 55-67.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lestari, P., Widodo, J., & Supriyanto, A. (2023). Implementasi aplikasi ARKAS dalam pengelolaan keuangan sekolah: Hambatan dan solusi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(2), 112-126.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen berbasis sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S., & Suryadi, A. (2021). Alokasi anggaran praktik dan mutu lulusan SMK di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 11(2), 201-213.
- Pardjono, P. (2016). *Manajemen pendidikan kejuruan*. UNY Press.
- Rahmawati, D., & Kurniawan, M. (2020). Ketergantungan sekolah negeri terhadap dana BOS: Analisis kritis kebijakan pembiayaan pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 78-92.
- Sudira, P. (2019). *Filosofi dan teori pendidikan vokasi dan kejuruan*. UNY Press.

- Suryani, L., & Hartono, B. (2024). Digitalisasi perencanaan anggaran sekolah melalui aplikasi ARKAS: Evaluasi implementasi. *Jurnal Sistem Informasi Pendidikan*, 8(1), 23-37.
- Wulandari, R., & Prasetyo, D. (2025). Kendala teknis penggunaan ARKAS pada bendahara sekolah di wilayah Kalimantan Tengah. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan*, 6(1), 44-58.